BERKA Strategika

POLICY BRIEF

TATA KELOLA DAN REKOMENDASI STRATEGIS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

30 SEPTEMBER 2025

Sumber Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev di presidenri.go.id

berkastrategika.or.id info@berkastrategika.or.id

Tata Kelola dan Rekomendasi Strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Eko Ruddy Cahyadi[1,2], Sucipto[1,3], Muhammad Rizal Taufikurahman[4], Mohammad Arif Yunus[1], Rikza Saifullah[1], Meriani Puspa Wardani[1]

[1] *Peneliti Berka Strategika*

[2] *Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi & Manajemen IPB University*

[3] *Guru Besar Bidang Ilmu Sistem Mutu dan Halal Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya*

[4] *Dosen Program Studi Agribisnis Universitas Trilogi Jakarta*

Ringkasan Eksekutif

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan gizi sekaligus mempercepat penurunan ***stunting*** melalui pendekatan **multidimensi** dan penguatan **ekonomi lokal**. Program ini dirancang dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang higienis, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat, dan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sama dengan mitra penyedia, dengan target menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Namun, sejak peluncuran hingga September 2025, tercatat lebih dari 6.452 siswa di 18 provinsi mengalami kasus keracunan yang terutama disebabkan oleh keterlambatan distribusi, dapur yang tidak steril, serta pengolahan dan penyimpanan yang kurang tepat.

Untuk itu, reformasi tata kelola MBG perlu menitikberatkan pada asesmen kepatuhan dan kinerja yayasan/SPPG yang diperkuat dengan *monitoring* berbasis data di setiap tahapan program, guna meminimalkan risiko konflik kepentingan. Strategi penguatan diarahkan pada pemenuhan SPPG berbasis prinsip Pareto 20:80 dengan merasionalisasi target 32.000 unit, berfokus terlebih dahulu pada pemenuhan sekitar 100 kabupaten/kota dengan prevalensi *stunting* ≥30%, sembari membenahi kualitas SPPG yang sudah ada agar memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Dengan ruang lingkup yang lebih terbatas, proses *monitoring* dapat lebih terkendali, dampak lebih terukur, dan hasilnya menjadi basis ekspansi nasional yang lebih matang.

Selain itu, penguatan rantai pasok perlu dilakukan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dari sisi kuantitas, penjaminan pasokan diarahkan pada akselerasi kapasitas pelaku usaha penyedia, khususnya sektor pertanian dan perikanan, melalui kebijakan dan dukungan teknis lintas sektor agar ketersediaan bahan baku MBG tetap konsisten tanpa menekan pasar pangan reguler. Sementara dari sisi kualitas, perlu diterapkan

validasi ketat, mekanisme e-procurement yang transparan, serta pengendalian ketat terhadap implementasi SOP dan standar yang telah ditetapkan. Seluruh proses produksi hingga distribusi harus distandardisasi melalui kepatuhan SOP, *dashboard* publik *real-time*, serta protokol kontingensi agar mutu pangan tetap terjaga sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program ini. Beberapa langkah mitigasi yang direkomendasikan:

- **Seleksi Yayasan/SPPG:** verifikasi kepatuhan seleksi yayasan/SPPG oleh auditor tersertifikasi; rotasi tim audit tiap 6 bulan; ringkasan hasil audit dipublikasikan di *dashboard* BGN.
- **Standardisasi & validasi mitra penyedia:** *e-procurement* dan *blacklist* otomatis bagi mitra pelanggar; audit acak oleh BPOM/Dinkes; verifikasi standar minimal mitra setiap enam bulan untuk memastikan kepatuhan SOP dan kualitas higienis.
- **Kendali perencanaan menu & gizi:** supervisi BGN sesuai *Isi Piringku* & halal; substitusi hanya dari daftar resmi setara gizi; evaluasi periodik dengan sanksi bertahap hingga pemutusan kemitraan.
- **Pengendalian mutu produksi & higienitas:** kepatuhan SOP, kebersihan peralatan, penyimpanan dingin; *checklist* digital dan dokumentasi foto/video kontrol kritis; inspeksi mendadak; penalti progresif bagi pelanggar.
- **Kendali mutu distribusi & rantai dingin:** GPS *tracking* kendaraan; sensor suhu *real-time*; eskalasi otomatis; buffer kendaraan di tiap klaster kecamatan.
- **Kontrol akhir penyajian**: *screening* alergi dan pengawasan akhir; *form* alergi digital; foto penyajian; pengecekan acak petugas kesehatan.
- **Kontingensi & stok:** gudang cadangan bahan bergizi per kabupaten; *monitoring* stok harian digital.
- ***Dashboard* publik & data:** *upload* harian; validasi silang; sanksi keterlambatan.
- **Protokol darurat:** *hotline* 24 jam SLA 2 jam; penutupan dapur 1x24 jam jika kasus terjadi; publikasi hasil uji laboratorium ≤7 hari; *update* resmi harian ke publik.

Sumber Foto: BPMI Setrpres/Laily Rachev di presidenri.go.id

Sekilas MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang termasuk dalam Delapan Program Hasil Cepat Terbaik, memiliki tujuan utama meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran. Latar belakang program ini tidak terlepas dari masih tingginya angka *stunting* di berbagai daerah, sehingga MBG hadir sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mempercepat penurunan *stunting*. Dengan mengusung pendekatan multidimensi yang mencakup gizi, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal, MBG dirancang tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai motor pemberdayaan masyarakat. Ekosistem bisnis desa/wilayah menjadi pilar kunci program, yang mendorong pemerataan ekonomi, memastikan pasokan bahan baku lokal yang bergizi dan higienis, serta membuka lapangan kerja di berbagai sektor. Sinergi ini selara konsep *Circular Economy Village* (CEV)[1].

Program MBG melibatkan berbagai aktor dalam rantai tata kelola dan pasokan. Di tingkat pusat, Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak sebagai pengendali utama yang merancang ekosistem program melalui koordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Alur program diawali oleh penyedia bahan baku (BUMDes, koperasi, Bulog, dan mitra lokal lainnya) yang menampung hasil pertanian lokal. Bahan baku disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas mengolah dan mendistribusikan dan memastikan makanan bergizi sampai kepada kelompok sasaran. SPPG bernaung di bawah mekanisme pengendalian BGN.

Sebaran Wilayah Implementasi MBG (per September 2025)

Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Per 24 September 2025, BGN mencatat SPPG telah mencapai 9.056 unit, dengan distribusi bervariasi antar provinsi. Konsentrasi tertinggi berada di Pulau Jawa: Jawa Barat (2.203), Jawa Tengah (1.338), dan Jawa Timur (1.049 SPPG), diikuti Lampung (467) dan Sulawesi Selatan (363). Provinsi timur, seperti Papua Selatan dan Papua Pegunungan, memiliki SPPG paling sedikit (masing-masing 3), sedangkan provinsi lain seperti Aceh (301), Sumatera Utara (297), Banten (303), dan NTB (295) menunjukkan

[1] Badan Gizi Nasional, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025*, Badan Gizi Nasional, 2024.

distribusi lebih merata. Secara keseluruhan, SPPG terkonsentrasi di pusat populasi dan wilayah dengan jumlah siswa besar, menandai perlunya pemerataan layanan gizi di daerah terpencil, terutama di Timur dan Kalimantan.

Dari capaian per kabupaten/kota, program telah menjangkau 452 dari 514 kabupaten/kota (87,94%), 2.797 dari 7.281 kecamatan (38,42%), dan 4.996 dari 84.048 kelurahan/desa (5,94%)[2].

Gambar 1. Persebaran Jumlah SPPG Berdasarkan Provinsi Per 24 September 2025

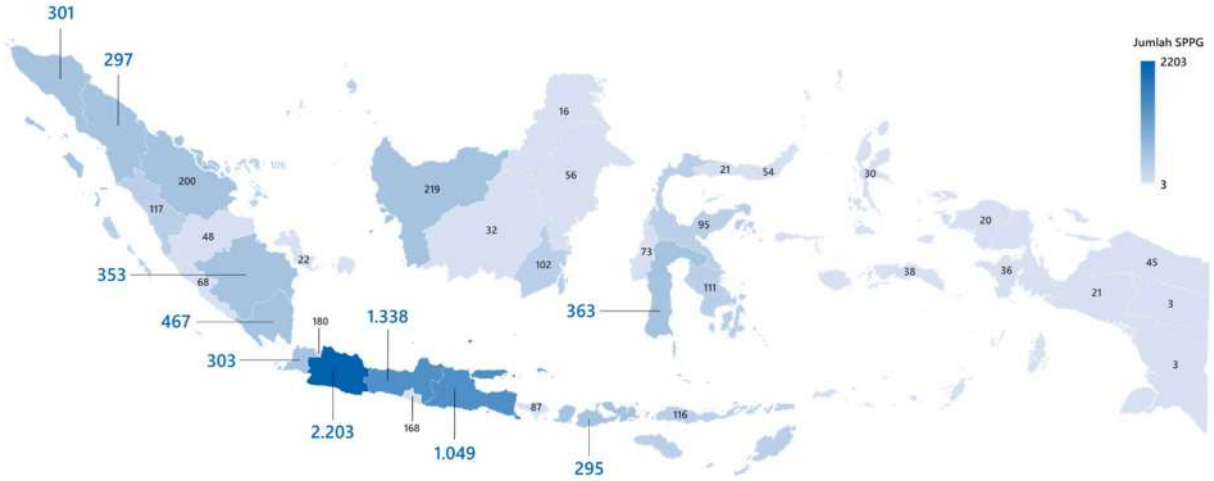

Sumber: bgn.go.id, data diolah, 2025

Sementara itu, data penerima manfaat menunjukkan bahwa mayoritas berasal dari jenjang pendidikan formal. Siswa SD merupakan kelompok terbesar dengan 2,39 juta penerima, disusul oleh SMP/MTs sebanyak 1,53 juta dan SMA/MA/SMK sebanyak 1,16 juta. Tingkat TK mendapat porsi 239 ribu penerima, sementara kelompok balita dan PAUD masing-masing sekitar 85 ribu dan 81 ribu penerima. Program ini juga menyasar kelompok khusus, seperti ibu menyusui (30 ribu), pondok pesantren (27 ribu), ibu hamil (18 ribu), serta SLB (8,7 ribu) (rincian selengkapnya lihat Lampiran 2).

[2] Badan Gizi Nasional, *Daftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang Telah Operasional*, 2025, diakses dari https://www.bgn.go.id/operasional-sppg.

Prioritas Gizi Wilayah dan Kapasitas Layanan MBG

Prevalensi *stunting*, meskipun secara definisi terbatas pada balita, dalam analisis ini digunakan sebagai proksi kerentanan gizi wilayah. Daerah dengan *stunting* tinggi umumnya juga menghadapi keberlanjutan masalah gizi pada kelompok usia sekolah. Oleh karena itu, penting menelaah rasio siswa–SPPG di daerah prioritas gizi untuk melihat sejauh mana kapasitas layanan MBG mampu menjawab beban tersebut.

Distribusi SPPG di wilayah dengan prevalensi *stunting* tertinggi menunjukkan ketimpangan signifikan antara kebutuhan intervensi gizi dan ketersediaan layanan MBG. Papua Pegunungan dengan prevalensi *stunting* 40% (tertinggi secara nasional) hanya tersedia 3 SPPG untuk melayani 216 ribu siswa. Rasio ini sangat timpang, mencapai lebih dari 72 ribu siswa per SPPG, sehingga kapasitas intervensi praktis tidak sebanding dengan beban masalah gizi. Situasi serupa tampak di Papua Tengah (32,5% *stunting*; 21 SPPG; 11.488 siswa/SPPG) dan Papua Barat Daya (30,5% *stunting*; 20 SPPG; 5.745 siswa/SPPG), yang menunjukkan keterbatasan kapasitas layanan di wilayah dengan masalah gizi akut.

Sebaliknya, provinsi dengan prevalensi *stunting* relatif lebih rendah justru memiliki distribusi SPPG lebih besar dan rasio siswa per unit lebih terkendali. Aceh (28,6% *stunting*) dan NTB (29,8%) misalnya, masing-masing mendapat lebih dari 295 SPPG dengan rasio hanya sekitar 4.300 - 4.500 siswa per unit, jauh lebih baik dibandingkan Papua atau Maluku. Di Jawa, dengan prevalensi *stunting* di kisaran 15–17%, jumlah SPPG sangat besar diantaranya Jawa Tengah 1.338 unit, Jawa Timur 1.049 unit, dan Jawa Barat 2.203 unit. Rasio siswa per SPPG di Jawa berkisar 4.800–7.800, jauh lebih proporsional dibandingkan Papua Pegunungan atau NTT (rincian selengkapnya lihat Lampiran 3).

Kesenjangan ini menunjukkan pola *over-coverage* di wilayah dengan prevalensi *stunting* rendah hingga menengah, dan *under-coverage* di wilayah dengan prevalensi *stunting* tinggi. Artinya, alokasi SPPG saat ini lebih menyerupai pemerataan nasional ketimbang strategi berbasis risiko gizi. Implikasinya, efektivitas MBG dalam menurunkan *stunting* berpotensi melemah bila tidak ada prioritas yang lebih tajam pada daerah dengan prevalensi *stunting* di atas 30%. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan selektif berbasis Pareto 20:80[3], yakni memfokuskan sekitar 20% kabupaten/kota dengan kontribusi terbesar pada beban *stunting* nasional (sekitar 100

[3] Zaman, M, An Unbiased Pareto Improvement Strategy for Poverty Alleviation (December 31, 2010). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1734050 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1734050

kabupaten/kota). Dengan cara ini, *monitoring* dapat dilakukan lebih intensif, kapasitas lebih terkendali, serta dampak yang lebih cepat terukur disamping ekspansi ke wilayah lain.

Analisis Tata Kelola MBG: Perspektif *Principal–Agent Theory*

Secara prinsip, tata kelola Program MBG telah dirancang melalui SOP dan petunjuk teknis yang transparan dan berbasis standar regulasi. Namun demikian, potensi *moral hazard* tetap inheren karena terkait dengan perilaku aktor implementasi di lapangan.

Dalam perspektif *Principal–Agent Theory* (Stephen Ross), hubungan antara BGN sebagai *principal* dan SPPG sebagai *agent* menyimpan potensi risiko tata kelola yang perlu diantisipasi. Pertama, ***adverse selection***, yakni kemungkinan kontrak diberikan kepada agen dengan kapasitas logistik terbatas atau pemahaman standar gizi yang kurang memadai, namun tetap terpilih karena faktor jaringan atau kedekatan politik. Kondisi ini dapat menurunkan mutu bahan baku maupun distribusi. Kedua, ***moral hazard***, di mana setelah kontrak ditandatangi, agen berpotensi menekan biaya dengan memilih bahan yang lebih murah atau mengabaikan prosedur higienis, sehingga menurunkan kepatuhan terhadap SOP produksi dan distribusi[4].

Kerangka ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan MBG. Dalam *agency theory*[5], relasi antara BGN sebagai *principal*, Yayasan/SPPG sebagai *agent*, hingga mitra penyedia sebagai *sub-agent*[6] berpotensi menghadapi konflik kepentingan di setiap level. BGN memiliki tujuan utama memastikan distribusi pangan bergizi yang aman dan berkualitas, namun dalam praktiknya *agent* maupun *sub-agent* dapat terdorong mengejar kepentingan pribadi.

[4] Einar Rasmussen and Magnus Gulbrandsen, "Government Support Programmes to Promote Academic Entrepreneurship: A Principal–Agent Perspective," *European Planning Studies* 20, no. 4 (2012): 527–546
[5] Una Obiose Kriston Nwajei, Trond Bølviken, and Magnus Mikael Hellström, "Overcoming the Principal–Agent Problem: The Need for Alignment of Tools and Methods in Collaborative Project Delivery," International Journal of Project Management 40, no. 9 (2022): 750–762
[6] Godfrey Yeung and Vincent Mok, "Regional Monopoly and Interregional and Intraregional Competition: The Parallel Trade in Coca-Cola Between Shanghai and Hangzhou in China," *Economic Geography* 82, no. 1 (2006): 89–109.

Gambar 3. *Principal–Agent Framework* pada Program MBG

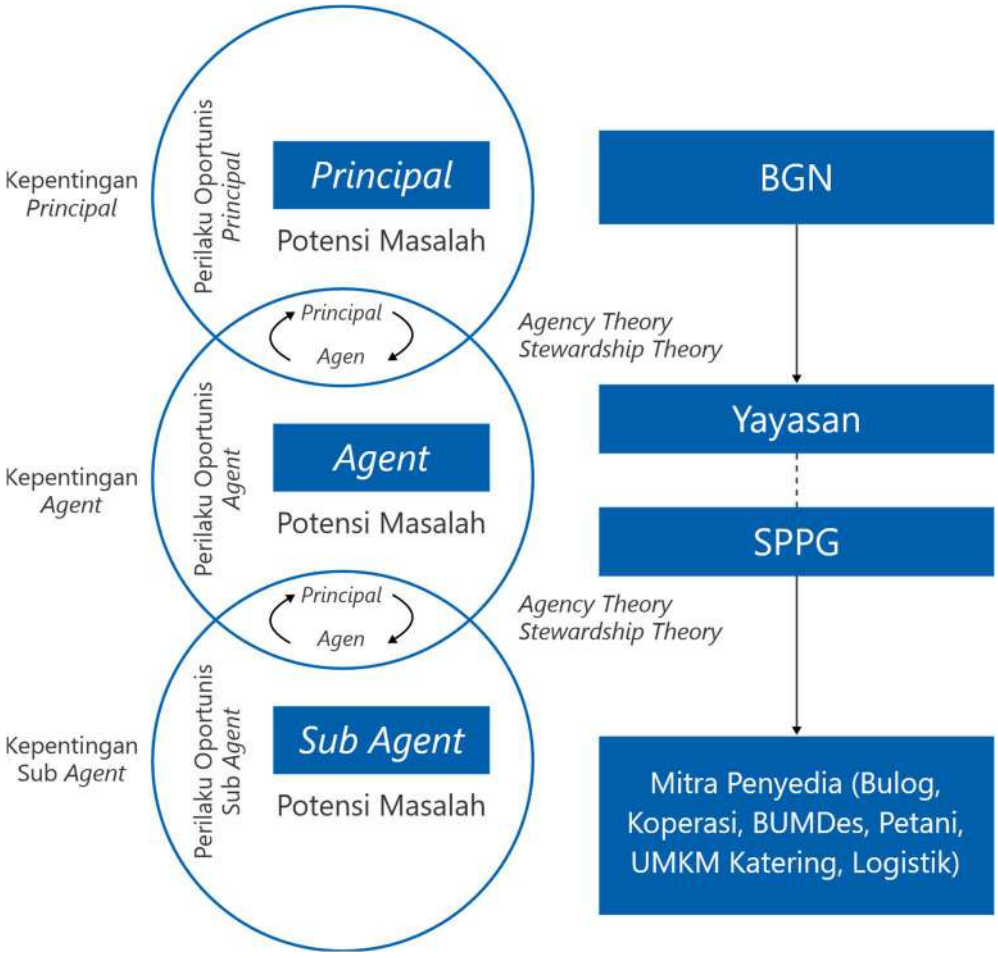

Sumber: Diolah, 2025

Di sinilah aspek **tata kelola dan pengawasan** menjadi krusial. Kejar target pembangunan SPPG dalam jumlah besar[7] tidak selalu diikuti dengan peningkatan kapasitas *monitoring*, sehingga ruang bagi perilaku oportunistik terbuka lebar. Minimnya pengawasan dapat berimplikasi pada penurunan kualitas gizi, kontaminasi makanan, hingga risiko kesehatan bagi penerima manfaat.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan bila dikaitkan dengan fakta bahwa Indonesia masih menghadapi **prevalensi *stunting* yang relatif tinggi** di sejumlah wilayah. Meskipun *stunting* utamanya terjadi pada balita, angka ini mencerminkan

[7] BGN, "BGN Catat 7.477 SPPG Operasional, Kejar Target 31.000 Unit Tahun Ini," Siaran Pers, 8 September 2025.

kerentanan gizi suatu daerah secara umum. Dengan demikian, lemahnya pengawasan dalam rantai pelaksanaan MBG tidak hanya berpotensi menurunkan efektivitas program, tetapi juga mengurangi kontribusinya dalam memperbaiki indikator gizi nasional.

Pada sisi lainnya, *stewardship theory* menawarkan sudut pandang berbeda yang menekankan kepercayaan, budaya kolaborasi, dan tata kelola yang sehat. Dalam kerangka ini, Yayasan/SPPG maupun mitra penyedia dipandang tidak semata sebagai pelaksana yang mengejar kepentingan ekonomis, melainkan sebagai *steward* yang menjaga amanah publik. Paradigma ini menuntut adanya sistem pengawasan yang bersifat **kolaboratif dan partisipatif**, bukan hanya berbasis kontrol formal. Dengan cara tersebut, setiap aktor dalam rantai MBG merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman dan bergizi.

Titik Kritis Hulu-Hilir MBG

Sejak peluncuran hingga September 2025, program MBG menghadapi kasus keracunan dengan total lebih dari 5.000 siswa terdampak di 18 provinsi (CISDI: 5.626[8]; JPPI: 6.452[9]). Insiden terjadi di berbagai wilayah diantaranya Garut[10], Banggai Kepulauan[10], Pamekasan[11], Sleman[12], dan Bandung[13]. Penyebab utamanya adalah makanan yang tidak aman atau terkontaminasi, baik karena kondisi busuk maupun kurang segar[14]

Dari sisi distribusi ditemui adanya keterlambatan[15] yang juga menyebabkan penurunan kualitas makanan[14], pengolahan atau penyimpanan yang kurang tepat[11] serta temuan dapur MBG yang tidak steril[16] sehingga meningkatkan risiko kerusakan pangan.

---

[8] CISDI Secretariat, *Picu 5.626 Kasus Keracunan, CISDI Mendesak Presiden Prabowo segera Moratorium dan Evaluasi Menyeluruh Program MBG*, CISDI, 19 September 2025, https://cisdi.org/siaran-pers/moratorium-MBG.
[9] https://www.detik.com/jogja/berita/d-8125299/jppi-ungkap-6-452-siswa-keracunan-mbg
[10] https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgj119359q4o
[11] https://rri.co.id/daerah/1844416/siswa-sd-diduga-keracunan-mbg-di-pamekasan
[12] https://ugm.ac.id/id/berita/kasus-keracunan-mbg-di-sleman-dan-lebong-pakar-ugm-sebut-minimnya-pengawasan-proses-penyiapan-makanan-higienis/
[13] https://news.detik.com/berita/d-8125721/ratusan-siswa-keracunan-sppg-di-cipongkor-bandung-barat-ditutup-sementara
[14] https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-ri-jatim-sidak-makan-bergisi-gratis-di-smpn-13-temukan-buah-busuk-minta-program-dievaluasi-
[15] Fokus Indosiar, *"Distribusi Makanan Bergizi Gratis di Sekolah Masih Dikeluhkan, Dinkes Beri Teguran"*, YouTube, diunggah pada Januari 2025, https://www.youtube.com/watch?v=FYraUaUeml8.
[16] https://radarlampung.bacakoran.co/read/25382/dapur-mbg-tak-steril-diduga-sebabkan-keracunan

Fakta lapangan tersebut mengindikasikan bahwa tantangan utama MBG tidak hanya terkait dengan cakupan distribusi, tetapi juga menunjukkan adanya potensi kerentanan pada aspek kualitas dan keamanan rantai pasok.

- Pada tahap seleksi Yayasan/SPPG, terdapat potensi penunjukan mitra lebih didasarkan pada kedekatan atau preferensi tertentu dibandingkan pada rekam jejak, kapasitas, dan kepatuhan terhadap standar program, yang dapat menurunkan objektivitas dan kualitas pelaksanaan sejak awal.
- Pada tahap pengadaan, terdapat potensi mitra penyedia lebih mengutamakan harga atau jaringan kedekatan dibandingkan pemenuhan standar minimal higienis dan gizi, yang dapat membuka ruang kontaminasi sejak awal.
- Di tahap produksi di dapur SPPG, risiko muncul apabila kepatuhan terhadap SOP, penggunaan peralatan bersih, maupun penyimpanan dingin tidak dijalankan secara konsisten, yang dalam kasus tertentu dapat berujung pada keracunan.
- Pada fase distribusi, potensi keterlambatan maupun kegagalan *cold chain* dapat menyebabkan makanan tiba dalam kondisi menurun kualitas gizinya atau bahkan basi.
- Pada fase penyajian di sekolah, ketiadaan *screening* alergi dan lemahnya pengawasan akhir berpotensi meningkatkan risiko kontaminasi sekunder maupun kasus alergi yang tidak terdeteksi.

Rekomendasi Strategis

Strategi tata kelola MBG perlu diarahkan pada penguatan tata kelola yang mampu menyeimbangkan aspek kontrol formal dengan pendekatan kolaboratif. Upaya ini ditempuh melalui tiga jalur utama.

Pertama, **reformasi tata kelola yayasan/SPPG** difokuskan pada asesmen kepatuhan dan kinerja dengan *monitoring* berbasis data, disertai rasionalisasi target 32.000 unit melalui prinsip Pareto 20:80 yaitu pemenuhan pada ±100 kabupaten/kota berprevalensi stunting ≥30% dan pembenahan kualitas SPPG, sehingga risiko *adverse selection* dan *moral hazard* berkurang serta distribusi program lebih terarah.

Kedua, **penguatan rantai pasok pangan bergizi** difokuskan pada validasi ketat mitra, *e-procurement* transparan, audit periodik standar pangan berkualitas (bergizi, higienis, dan halal), serta akselerasi kapasitas penyedia melalui kebijakan dan dukungan teknis lintas sektor agar pasokan MBG stabil tanpa menekan pasar reguler.

Ketiga, **pengendalian mutu produksi dan distribusi** yang menekankan kepatuhan SOP, dokumentasi proses secara sistematis, serta integrasi *dashboard* publik untuk memantau mutu makanan dan alur distribusi secara *real-time*. Pendekatan ini diperkuat dengan protokol kontingensi, termasuk mekanisme respons cepat atas temuan kritis, sehingga kepercayaan publik terhadap program tetap terjaga. Untuk memastikan strategi tersebut dapat dioperasionalkan, rincian fokus risiko, langkah taktis, serta mitigasi di setiap tahapan program MBG disajikan pada Lampiran 4.

.

Sumber Foto: BPMI Setrpres/Laily Rachev di presidenri.go.id

Lampiran 1. Pendekatan dan Metode

Policy brief ini disusun dengan menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, ***desk study*** yang mencakup telaah terhadap dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, hasil penelitian akademik, serta berita terkini terkait pelaksanaan program MBG.

Kedua, dilakukan ***in-depth interview*** dengan *key informant stakeholder* program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Wawancara ini bertujuan menggali informasi kontekstual mengenai proses pengambilan keputusan, tantangan lapangan, serta strategi pengawasan dan tata kelola yang telah maupun sedang dijalankan. Kombinasi kedua metode ini menghasilkan analisis yang lebih komprehensif sekaligus relevan untuk mendukung rekomendasi kebijakan yang diajukan.

Lampiran 2. Jumlah Penerima Manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) Hingga Awal Juli 2025

Jumlah Penerima Manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG)
Hingga Awal Juli 2025

Sumber: indonesiabaik.id

Lampiran 3. Sebaran SPPG dan Rasio Siswa per SPPG di Provinsi dengan Prevalensi Stunting Tertinggi

Sebaran SPPG dan Rasio Siswa per SPPG di Provinsi dengan Prevalensi Stunting Tertinggi

Provinsi	% *Stunting* 2024	Jumlah SPPG 24 Sep 2025	Total Siswa	Siswa:SPPG
Papua Pegunungan	40	3	216.001	72.000,33
Nusa Tenggara Timur	37	116	1.362.416	11.744,97
Sulawesi Barat	35,4	73	327.765	4.489,93
Papua Tengah	32,5	21	241.259	11.488,52
Papua Barat Daya	30,5	20	114.902	5.745,10
Nusa Tenggara Barat	29,8	295	1.338.860	4.538,51
Aceh	28,6	301	1.292.869	4.295,25
Maluku	28,4	38	457.080	12.028,42
Kalimantan Barat	26,8	219	1.186.330	5.417,03
Sulawesi Tengah	26,1	95	701.880	7.388,21
Sulawesi Tenggara	26,1	111	685.889	6.179,18
Papua Selatan	25,8	3	154.502	51.500,67
Sumatera Barat	24,9	117	1.292.452	11.046,60
Papua	24,7	45	248.705	5.526,78
Papua Barat	24,6	36	151.327	4.203,53
Gorontalo	23,8	21	259.864	12.374,48
Sulawesi Selatan	23,3	363	1.997.041	5.501,49
Maluku Utara	23,2	30	330.289	11.009,63
Kalimantan Selatan	22,9	102	891.621	8.741,38
Kalimantan Timur	22,2	56	905.699	16.173,20
Kalimantan Tengah	22,1	32	641.735	20.054,22
Sumatera Utara	22	297	3.571.917	12.026,66
Banten	21,1	303	2.761.607	9.114,21
Sulawesi Utara	20,8	54	491.617	9.104,02
Kep. Bangka Belitung	20,1	22	328.642	14.938,27
Riau	20,1	200	1.671.347	8.356,74
Bengkulu	18,8	68	458.729	6.746,01
Kalimantan Utara	17,6	16	166.144	10.384,00
DI Yogyakarta	17,4	168	723.261	4.305,13
DKI Jakarta	17,3	180	1.793.060	9.961,44
Jambi	17,1	48	824.395	17.174,90
Jawa Tengah	17,1	1338	7.285.717	5.445,23
Sumatera Selatan	15,9	353	1.941.654	5.500,44
Jawa Barat	15,9	2203	10.574.767	4.800,17
Lampung	15,9	467	1.933.696	4.140,68

Provinsi	% *Stunting* 2024	Jumlah SPPG 24 Sep 2025	Total Siswa	Siswa:SPPG
Kepulauan Riau	15	106	489.075	4.613,92
Jawa Timur	14,7	1049	8.188.820	7.806,31
Bali	8,7	87	879.022	10.103,70
INDONESIA		9056	58.881.956	

Sumber: Data diolah, 2025

Lampiran 4. Instrumen Strategis Tata Kelola MBG

Instrumen Strategis Tata Kelola MBG

Strategi / Instrumen	Langkah Taktis & Fokus Risiko	Aktor Supervisi	Aktor Pelaksana / Terdampak	Mitigasi
Reformasi Tata Kelola	Restrukturisasi SPPG berbasis data (misal skor higienis BPOM, kepatuhan SOP); risiko: SPPG tidak siap	BGN	SPPG	▪ *Monitoring* progres berbasis *dashboard* ▪ Audit internal dan evaluasi berkala ▪ Pendampingan & *capacity building*
Delegasi Auditor Independen	Tunjuk auditor profesional pihak ketiga seleksi Yayasan/SPPG risiko: ketidakobjektifan internal	BGN	Auditor Independen, Yayasan/ SPPG	▪ Daftar auditor tersertifikasi ▪ Rotasi tim audit tiap 6 bulan ▪ Hasil audit wajib dipublikasikan ringkas di *dashboard* BGN
Standardisasi & Validasi Mitra Penyedia	Validasi mitra penyedia berdasarkan penerapan prosedur higienis dan pemenuhan standar gizi minimal; risiko: ketidakpatuhan mitra penyedia terhadap SOP → kualitas gizi menurun atau risiko kesehatan	BGN, SPPG	SPPG, Mitra penyedia	▪ Sistem *e-procurement* dengan *blacklist* otomatis mitra penyedia pelanggar ▪ Audit acak bahan baku oleh BPOM/Dinkes; ▪ Kontrak otomatis dihentikan jika 2x gagal audit. ▪ Laporan hasil uji dipublikasikan ▪ Sertifikat lulus audit berlaku hanya 6 bulan ▪ Temuan kritis harus ditindaklanjuti mitra dalam 7 hari untuk memastikan bahan aman

Strategi / Instrumen	Langkah Taktis & Fokus Risiko	Aktor Supervisi	Aktor Pelaksana / Terdampak	Mitigasi
Kendali perencanaan menu & gizi	Penyusunan menu berbasis standar *Isi Piringku*, halal, bergizi seimbang, rotasi menu. risiko: Menu disusun mengikuti selera siswa/guru → potensi gizi tidak terpenuhi, penggunaan bahan tidak halal, mutu rendah. Catatan: Penyesuaian bahan di wilayah non-muslim mengikuti preferensi lokal, tetap sesuai standar gizi seimbang	BGN	SPPG	▪ BGN melakukan supervisi rutin atas menu SPPG sesuai *Isi Piringku*, halal dan mutu pangan nasional ▪ Substitusi bahan lokal hanya bisa dilakukan dari daftar pengganti resmi yang setara gizi (misalnya: daging ayam ↔ ikan ↔ telur, bukan ke produk olahan rendah mutu). ▪ Kinerja SPPG dievaluasi secara periodik, pelanggaran ditindak melalui sanksi progresif hingga pemutusan kemitraan
Pengendalian mutu produksi & higienitas	Kepatuhan SOP; peralatan bersih; penyimpanan dingin; risiko: SOP dilanggar → keracunan massal	BGN	SPPG, UMKM Katering	▪ Percepatan sertifikasi SLHS & halal melalui koordinasi dengan Dinkes, BPJPH, LPH, dan Komisi Fatwa MUI ▪ *Checklist* dan dokumentasi dilakukan secara sistematis terutama saat produksi dan pengeluaran makanan yang berisiko tinggi, mencakup kebersihan dapur, peralatan, suhu

Strategi / Instrumen	Langkah Taktis & Fokus Risiko	Aktor Supervisi	Aktor Pelaksana / Terdampak	Mitigasi
				penyimpanan, dan kondisi makanan. ▪ Foto/video wajib khusus tahap kontrol kritis (bahan baku/menu yang rentan degradasi/cepat basi), terhubung ke *dashboard* monitoring digital ▪ Inspeksi mendadak ▪ Rotasi peralatan ▪ Penalti progresif/*blacklist* bagi pelanggar berulang ▪ Sistem pelaporan risiko cepat: staf melaporkan potensi masalah untuk pencegahan dini. ▪ Pengawasan partisipatif: sekolah/komunitas menilai kebersihan dapur untuk meningkatkan kepatuhan
Kendali Mutu Distribusi & Rantai Dingin	Distribusi sesuai SOP; sensor suhu & kelembaban; alarm otomatis >4°C; risiko: penyimpangan suhu atau keterlambatan distribusi	SPPG	Mitra penyedia, Sekolah/ Posyandu	▪ GPS *tracking* kendaraan ▪ Sensor suhu/*alarm* suhu *real-time* terhubung aplikasi pengawas ▪ Eskalasi otomatis: jika data tidak masuk atau indikasi manipulasi sensor terdeteksi, sistem memberi peringatan ke PIC SPPG dan manajemen mitra, serta

Strategi / Instrumen	Langkah Taktis & Fokus Risiko	Aktor Supervisi	Aktor Pelaksana / Terdampak	Mitigasi
				pemberitahuan ke sekolah/posyandu untuk menolak penerimaan ▪ *Buffer* kendaraan siaga di tiap klaster kecamatan ▪ Pemeriksaan kondisi makanan, dan foto wajib diunggah oleh sekolah/posyandu
Kontrol Akhir Penyajian	*Screening* alergi siswa; pengawasan akhir penyajian; risiko: alergi tak terdeteksi, kontaminasi sekunder	Sekolah/ Posyandu	PIC sekolah/ posyandu	▪ *Form* alergi diisi orang tua; kartu alergi siswa; ▪ *Monitoring* visual kondisi makanan dan dokumentasi; ▪ Pengecekan acak berkala oleh PIC sekolah/posyandu ▪ Mekanisme umpan balik dari siswa/orang tua: keluhan/ rekomendasi untuk ditindaklanjuti SPPG atau BGN
Kontingensi & *Buffer Stock*	Menyiapkan stok cadangan bahan bergizi berkualitas; risiko: stok habis atau mendekati kedaluwarsa; potensi bahan baku pengganti kualitas rendah jika stok utama tidak tersedia	SPPG	Mitra penyedia	▪ Gudang cadangan per kabupaten ▪ *Monitoring* digital stok harian dengan sistem peringatan sebelum bahan mendekati kedaluwarsa
Dashboard Publik *Real-time*	Data dari SPPG (foto bahan baku, menu, laporan,	BGN	SPPG, Mitra Penyedia, Sekolah/	▪ *Upload* harian wajib sebelum jam 12 siang,

Strategi / Instrumen	Langkah Taktis & Fokus Risiko	Aktor Supervisi	Aktor Pelaksana / Terdampak	Mitigasi
	survei terstruktur siswa/orang tua berbasis formulir/aplikasi resmi; divalidasi; ditampilkan grafik sebaran, indikator kinerja; risiko: keterlambatan atau ketidakakuratan data		Posyandu, Siswa, Orang Tua	▪ Validasi silang oleh PIC Sekolah/Posyandu dengan frekuensi realistis (pemeriksaan cepat harian dan audit sampel) ▪ Sanksi jika laporan terlambat
Kepercayaan & Legitimasi	Protokol darurat keluhan kesehatan: tutup dapur, investigasi lab, publikasi hasil uji, perbaikan & verifikasi ulang standar; risiko: keterlambatan respons → potensi kasus keracunan meningkat	BGN	SPPG,Mitra penyedia, Sekolah/ Posyandu	▪ *Hotline* 24 jam dengan SLA 2 jam respons, dapur langsung ditutup 1x24 jam jika ada kasus ▪ Hasil uji lab dipublikasikan ≤7 hari ▪ Juru bicara resmi BGN *update* harian via website dan media

Profil Penulis

Eko Ruddy Cahyadi adalah *Associate Professor* Manajemen Produksi dan Operasi pada Departemen Manajemen IPB University. Meraih doktor bidang Ekonomi dari Leibniz University of Hannover, Jerman pada tahun 2013. Saat ini ia menjadi International *Expert* dalam *Value Chain Development* untuk *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO). Sejak 2018, ia juga menjadi *Strategic Advisor* di Berka Strategika, memegang peranan penting dalam pengembangan metodologi penelitian dan kajian di bidang ekonomi, tatakelola, manajemen, serta pengembangan sektor riil.
No HP: 085882645028

Sucipto adalah seorang profesor di bidang sistem mutu dan halal pada Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya (UB), yang dikenal dengan keahliannya dalam riset, pengembangan sistem mutu dan keamanan pangan, serta pengembangan industri halal. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknologi Industri Pertanian UB dan Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian UB, serta memiliki pengalaman luas sebagai asesor kompetensi keamanan pangan dan auditor halal. *Lead Expert* Berka Strategika di bidang sistem mutu dan halal.
No HP: 08123317178

Muhammad Rizal Taufikurahman, lahir di Garut Jawa Barat, 21 November 1978. Menyelesaikan pendidikan formal di IPB Bogor pada tahun 2000, pendidikan master dan doktor juga diselesaikan pada tahun 2004 dan 2012 yang diperoleh dalam bidang Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) di Sekolah Pascasarjana IPB. Selain menjadi peneliti/tenaga ahli bidang ekonomi di beberapa kementerian/ lembaga nasional dan lembaga internasional, ia juga sebagai dosen yang mengampu beberapa mata kuliah seperti Ekonomi Makro, Ekonomi Mikro, Ekonomi Pertanian, Pemodelan Ekonomi (seperti model Ekonometrika, model CGE, model GTAP), Statistika Ekonomi, Ekonomi Regional, serta Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi di beberapa perguruan tinggi. Beberapa lembaga profesional dan profesi yang diikuti saat ini diantaranya INDEF, AAI, PERHEPI, KADIN, dan Strategika.
No HP: 081310209021

Mohammad Arif Yunus adalah master Manajemen Pembangunan Daerah yang saat ini sedang menyelasaikan program doktoral di Sekolah Pasca Sarjana IPB di bidang Pengembangan Wilayah Pedesaan. Selain menjadi *Strategic Advisor* Berka Strategika, ia juga aktif menjadi narasumber muamalah dibeberapa komunitas. Ia memiliki keahlian di bidang manajemen pembangunan daerah dan pengembangan bisnis syariah. Beberapa karya buku Arif Yunus adalah Ekonomi Islam Fundamental dan Pengantar Ekonomi Islam.
No HP: 0811112170

Rikza Saifullah adalah *expert* pengembangan UMKM yang aktif sejak awal berdirinya Berka Strategika. Pendidikan formal di IPB diawali di jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan dengan minat manajemen industri pangan dan selanjutnya program Magister Pengembangan Industri Kecil Menengah Sekolah Pasca Sarjana IPB. Bidang keahlian yang dimiliki adalah manajemen dan pengembangan UMKM, pengembangan model bisnis dan studi kelayakan usaha dengan pengalaman penelitian, kajian dan konsultasi selama 10 tahun di lebih dari 20 provinsi di Indonesia.
No HP: 081384498159

Meriani Puspa Wardani adalah *research specialist* Berka Strategika. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Meriani memiliki pengalaman dalam survei dan penelitian di bidang ekonomi, manajemen dan pengembangan UMKM di beberapa provinsi. Keahlian utama yang dimiliki yaitu di bidang ekonomi dan studi pembangunan.
No HP: 089638225026

BERKA
Strategika

KPP IPB Baranangsiang IV Blok A/35 Tanah
Baru, Bogor Utara, Kota Bogor 16154

+628131010404

info@berkastrategika.or.id

berkastrategika.or.id

berkastrategika